



IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)

Nadya Suryaning Anugrah¹, Agus Sukristiyanto², Muhammad Roisul Basyar³

¹²³ Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

A B S T R A K

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Kebijakan ini menempatkan gizi sebagai fondasi penting dalam mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta pemerataan kesempatan pendidikan bagi peserta didik. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang lebih dahulu melaksanakan program ini melalui berbagai kesiapan kelembagaan, pemetaan sekolah sasaran, serta penguatan rantai pasok pangan lokal. Implementasi program MBG di Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik, terutama terkait penyediaan menu bergizi, koordinasi lintas sektor, dan adaptasi kebijakan di tingkat sekolah. Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga memperlihatkan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kesiapan sumber daya, serta kebutuhan pengawasan kualitas makanan. Namun demikian, pelaksanaan MBG di Surabaya memberikan gambaran bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, pelaku usaha pangan, serta dukungan masyarakat.

Kata Kunci: program makan bergizi gratis, implementasi kebijakan, Kota Surabaya

A B S T R A C T

The Free Nutritious Meal Program (MBG), established through Presidential Regulation Number 83 of 2024, is one of the government's strategic initiatives to strengthen the quality of human resources from school age. This policy positions nutrition as an essential foundation to support health, learning concentration, and equal educational opportunities for students. Surabaya City is among the regions that have implemented this program earlier through various institutional preparations, mapping of target schools, and strengthening of the local food supply chain. The implementation of the MBG program in Surabaya shows interesting dynamics, particularly related to the provision of nutritious menus, cross-sector coordination, and policy adaptation at the school level. On the other hand, the implementation also reveals several challenges, such as budget limitations, resource readiness, and the need for food quality supervision. Nevertheless, the implementation of MBG in Surabaya illustrates that the success of the program greatly depends on collaboration between local governments, educational institutions, food business actors, and community support.

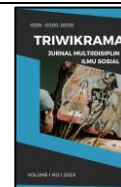
Keywords: free nutritious meal program, policy implementation, Surabaya City

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menargetkan peningkatan kualitas gizi anak usia sekolah serta penguatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini disusun sebagai respons terhadap permasalahan gizi nasional seperti stunting, anemia, rendahnya konsentrasi belajar, serta ketidakmerataan akses pangan bergizi bagi peserta didik. Pemerintah pusat, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menjangkau lima kelompok penerima—anak usia dini, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—dengan penyediaan makanan bergizi setiap hari sekolah sebagai bentuk intervensi gizi terstruktur.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com

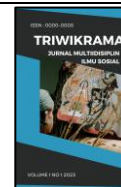


Implementasi MBG mulai dilakukan secara bertahap pada 2 Januari 2025 di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana diumumkan dalam laporan resmi pemerintah (Kontan, 2024). Pemerintah juga menekankan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi nasional pembangunan SDM untuk mengurangi beban gizi buruk dan meningkatkan mutu pendidikan dasar (Setneg, 2025). Sejalan dengan itu, WHO juga menilai program makan sekolah sebagai intervensi gizi yang efektif untuk mengatasi malnutrisi, meningkatkan partisipasi belajar, dan mendorong kebiasaan makan sehat sejak dini.

Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang bergerak paling cepat dalam mempersiapkan implementasi program tersebut. Melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan uji coba pada 13 Januari 2025 dan mulai menyiapkan pola distribusi, mekanisme pengawasan, serta kerja sama dengan UMKM lokal sebagai penyedia makanan. Tahun 2025, pelaksanaan MBG di Surabaya mencakup lebih dari 232.000 siswa dan melibatkan lebih dari 1.500 UMKM. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung penyediaan menu bergizi, peningkatan fasilitas distribusi, serta monitoring secara berkala berdasarkan pemberitaan resmi (Detik News, 2025). Sebagai kota metropolitan dengan 31 kecamatan dan 154 kelurahan, karakteristik ruang dan struktur administrasi Surabaya memiliki peran penting dalam menentukan arah perencanaan dan kebutuhan distribusi layanan MBG. Peta administratif Surabaya menunjukkan variasi signifikan antara wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Utara, terutama Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Semampir sebagai konteks penelitian. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda: Lakarsantri digambarkan sebagai wilayah yang berkembang pesat, sementara Semampir memiliki kepadatan penduduk tinggi dan kerentanan ekonomi lebih besar. Perbedaan ini menyebabkan kebutuhan implementasi MBG di setiap kecamatan tidak sama, baik dari segi kapasitas sekolah, fasilitas pendukung, maupun kemampuan rantai pasok makanan.

Variasi kondisi wilayah tersebut diperkuat oleh data kependudukan BPS Kota Surabaya (2024), yang menunjukkan ketimpangan jumlah penduduk dan pertumbuhan wilayah antar kecamatan. Kecamatan seperti Tambaksari, Kenjeran, dan Semampir memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga berpotensi memiliki lebih banyak siswa penerima manfaat, sementara kecamatan seperti Jambangan dan Bulak relatif lebih kecil jumlah populasinya. Ketimpangan ini mempengaruhi beban implementasi MBG serta kebutuhan fasilitas pendidikan di masing-masing wilayah. Data distribusi sekolah dasar menunjukkan bahwa kecamatan dengan populasi besar seperti Sukolilo, Wonokromo, dan Rungkut juga memiliki jumlah SD yang lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Sebaliknya, wilayah dengan populasi lebih sedikit seperti Gunung Anyar dan Jambangan memiliki jumlah SD yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi cakupan dan kebutuhan distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah tersebut.

Secara umum, tantangan implementasi MBG tidak hanya berasal dari regulasi pusat dan ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi kondisi demografis, kesiapan sekolah, kapasitas UMKM, dan dukungan masyarakat. Selain itu, ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan teknis pelaksanaan di daerah juga menjadi isu penting, terutama karena belum adanya petunjuk teknis yang sangat rinci dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah, termasuk Surabaya, harus berimprovisasi dalam menyusun prosedur operasional, standar menu, hingga mekanisme pelaporan di sekolah-sekolah pelaksana. Melihat kompleksitas dan skala besar implementasi MBG, analisis terhadap bagaimana kebijakan ini dijalankan pada tingkat sekolah menjadi sangat penting. Sekolah merupakan pelaksana teknis yang langsung berhadapan dengan peserta didik dan UMKM, sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat terlihat secara nyata pada proses distribusi, kualitas makanan, penerimaan masyarakat, serta kapasitas internal sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis implementasi Program MBG di sekolah-sekolah penerima manfaat Kota Surabaya melalui pendekatan teori implementasi kebijakan



Solichin Abdul Wahab (2001), yang mencakup lima faktor penting: kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok pelaksana, dukungan lembaga atasan, serta kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Dengan demikian, pendahuluan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penelitian, skala implementasi di Surabaya, konteks sosial dan geografis wilayah penelitian, serta relevansi teori implementasi kebijakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif**, karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan di sekolah-sekolah penerima manfaat. Pendekatan kualitatif dipilih sebab sesuai untuk menelaah fenomena sosial secara kontekstual, menggali pengalaman pelaksana kebijakan, serta memahami dinamika implementasi yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti menangkap makna, persepsi, serta interaksi yang terjadi antar aktor pelaksana kebijakan di lapangan.

Metode **studi kasus** digunakan untuk menganalisis implementasi MBG pada unit tertentu, yaitu SDN Sidotopo 1/48, SMPN 11 Surabaya, dan SMA Negeri 8 Surabaya. Ketiga sekolah tersebut dipilih secara purposive untuk mewakili karakteristik wilayah berbeda: sekolah yang berada di lingkungan padat penduduk, sekolah dengan jumlah siswa besar, serta sekolah dengan fasilitas relatif lebih memadai. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan pemahaman komprehensif terhadap variasi implementasi MBG pada konteks yang berbeda.

2.1 Lokasi Penelitian

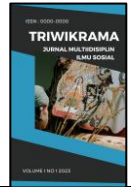
Penelitian dilakukan pada empat lokasi utama:

1. **SDN Sidotopo 1/48 Surabaya** - berada di wilayah padat penduduk, mencerminkan tantangan implementasi pada kawasan dengan konsentrasi siswa tinggi.
2. **SDN Sumur Welut III/440 Surabaya** - sekolah dengan jumlah peserta didik besar sehingga menuntut manajemen distribusi makanan yang lebih kompleks.
3. **TK AL - IKHLASH** - memiliki sarana dan fasilitas lebih lengkap, memberikan gambaran implementasi pada sekolah yang lebih siap secara infrastruktur.
4. RA Nurul Huda
5. TK Permata Bunda
6. **Dinas Pendidikan Kota Surabaya** - sebagai lembaga pengendali dan pengawas pelaksanaan MBG di tingkat daerah.

Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan aspek geografis, sosial ekonomi, dan kapasitas institusional yang relevan untuk menggambarkan keberagaman konteks implementasi MBG di Surabaya.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:



- **Data Primer**, yakni data yang diperoleh langsung melalui:
 - a. Wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru penanggung jawab MBG, penyedia makanan (UMKM), dan siswa penerima manfaat.
 - b. Observasi langsung terhadap proses distribusi, penerimaan makanan, mekanisme pencatatan, serta kondisi fasilitas sekolah.
- **Data Sekunder**, berupa:
 - a. Dokumen peraturan seperti Perpres 83 Tahun 2024.
 - b. Arsip dan laporan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - c. Publikasi BPS Kota Surabaya terkait data demografi dan pendidikan.
 - d. Artikel berita, dokumentasi kegiatan, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan MBG.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

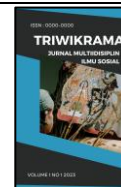
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Observasi**
Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan program di sekolah, mulai dari penerimaan makanan dari UMKM, pengecekan menu, pembagian kepada siswa, hingga konsumsi makanan di lingkungan sekolah. Observasi dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan panduan program serta untuk mengetahui tantangan teknis yang muncul di lapangan.
2. **Wawancara Mendalam**
Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur agar informan memiliki ruang menjelaskan pengalaman secara komprehensif. Pertanyaan difokuskan pada pemahaman pelaksana tentang program, kesiapan sekolah, dukungan masyarakat, dinamika kerja sama dengan UMKM, serta hambatan implementasi.
3. **Dokumentasi**
Pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi data primer, seperti foto kegiatan, jadwal distribusi, menu makanan, pedoman pelaksanaan, serta data profil sekolah. Dokumentasi penting untuk memvalidasi temuan lapangan dan mendukung analisis.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti lima faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Solihin Abdul Wahab (2001), yang meliputi tiga tahapan utama :

1. **Reduksi Data**
Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan dikategorikan sesuai fokus penelitian, terutama berdasarkan lima faktor implementasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab (2001).
2. **Penyajian Data**
Data disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan kategori tematik untuk memudahkan penafsiran. Penyajian data dilakukan agar pola-pola implementasi dapat terlihat secara jelas.
3. **Penarikan Kesimpulan**
Kesimpulan dibuat berdasarkan pola dan temuan penting yang muncul selama analisis.



Kesimpulan bersifat terus berkembang hingga data dianggap jenuh dan hubungan antar kategori telah jelas.

2.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui:

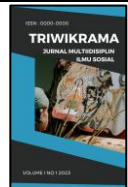
1. **Triangulasi sumber** (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen).
2. **Triangulasi teknik** (menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk suatu fenomena yang sama).
3. **Member checking**, yaitu mengonfirmasi kembali pernyataan informan untuk menghindari kesalahan interpretasi.
4. **Pencatatan rinci** terhadap proses pengumpulan data agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sekolah pelaksana, UMKM penyedia makanan, hingga orang tua dan masyarakat. Implementasi MBG di Kota Surabaya berjalan dalam kerangka koordinasi terpusat di bawah Dinas Pendidikan, yang bertanggung jawab melakukan pendataan penerima manfaat, sosialisasi teknis, pembentukan tim monitoring, dan pengawasan melalui aplikasi pelaporan. Dinas Pendidikan memanfaatkan dashboard pemantauan serta grup komunikasi lintas sekolah untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai standar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa Dinas memantau melalui dashboard sekolah, aplikasi MATA HATI, dan grup WhatsApp sekolah penerima manfaat .

Pelaksanaan di sekolah menunjukkan dinamika yang berbeda bergantung pada kondisi sosial ekonomi wilayah, kapasitas fasilitas sekolah, dan kesiapan internal sekolah. SDN Sidotopo 1/48 yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan karakteristik ekonomi masyarakat menengah ke bawah memiliki beban implementasi yang lebih besar. Distribusi makanan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan siswa, sehingga sekolah menyiapkan ruang sementara untuk penempatan boks makanan. Kondisi wilayah SDN Sidotopo 1/48 dan data demografis Kecamatan Semampir dapat dilihat pada deskripsi wilayah Surabaya Utara yang memiliki tingkat kepadatan dan beban pendidikan tinggi .

SMP Negeri 11 Surabaya menghadapi tantangan berbeda karena jumlah siswa yang besar. Proses distribusi harus dilakukan bertahap dan melibatkan peran tambahan dari guru piket maupun OSIS untuk menjaga keteraturan alur distribusi. Beberapa kali sekolah mengalami keterlambatan distribusi dari UMKM karena faktor jarak dan kapasitas produksi . Sementara itu, SMA Negeri 8 Surabaya yang memiliki fasilitas memadai seperti ruang penyimpanan makanan dan akses logistik yang lebih baik menunjukkan pelaksanaan yang lebih tertata. Hal ini menjelaskan bahwa kapasitas fasilitas fisik sekolah berpengaruh pada kualitas implementasi.



Peran UMKM sebagai penyedia menu MBG sangat krusial. UMKM dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan diharapkan dapat memenuhi standar gizi program melalui penyediaan menu yang terdiri atas karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Berdasarkan temuan lapangan, variasi menu yang diberikan kepada siswa umumnya sudah memenuhi aspek tersebut. Namun demikian, terdapat ketidakkonsistenan kualitas yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas produksi UMKM. Beberapa UMKM mampu menjaga kualitas makanan dan ketepatan waktu pengiriman, sementara sebagian lainnya mengalami keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian porsi. Sekolah biasanya melakukan pengecekan awal terhadap kondisi makanan, baik dari segi suhu, kebersihan, maupun kelayakan konsumsi sebelum dibagikan kepada siswa .

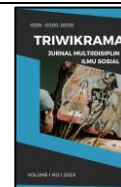
Dukungan masyarakat terhadap MBG tergolong tinggi. Orang tua dari berbagai sekolah—seperti RA Nurul Huda dan TK Permata Bunda—menyampaikan rasa syukur karena program ini meringankan beban kebutuhan makan harian anak dan memberikan jaminan gizi yang lebih baik bagi mereka. Orang tua juga terlibat aktif dalam memastikan anak mengonsumsi makanan yang diberikan sekolah. Namun dukungan ini tidak terlepas dari ekspektasi masyarakat terhadap kualitas makanan. Ketika menu dianggap kurang menarik atau porsi kecil, keluhan meningkat, namun sekolah segera menyampaikan laporan kepada UMKM dan dinas terkait untuk mendapatkan perbaikan layanan .

Beberapa hambatan pelaksanaan juga muncul, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan makanan di sekolah tertentu, ketidaksesuaian jumlah porsi, serta keterlambatan pengiriman dari UMKM yang memiliki jarak produksi cukup jauh dari sekolah sasaran. Selain itu, beban administrasi guru meningkat karena setiap kegiatan distribusi harus dilaporkan melalui aplikasi. Pada awal pelaksanaan, sejumlah sekolah juga mengalami kendala teknis saat mengunggah dokumentasi di aplikasi MATA HATI . Hambatan lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis yang sangat rinci dari pemerintah pusat sehingga pemda dan sekolah harus membuat SOP sendiri. Hal ini menyebabkan variasi pelaksanaan antar sekolah dan antar kecamatan .

Jika dianalisis melalui teori implementasi Solichin Abdul Wahab (2001), faktor-faktor implementasi dapat dibahas sebagai berikut.

Pertama, **kondisi sosial ekonomi dan teknologi** sangat mempengaruhi kualitas implementasi MBG. Sekolah di wilayah padat dan berpenduduk besar seperti Semampir menghadapi beban operasional yang lebih berat dibanding wilayah yang lebih mapan seperti Lakarsantri. Perbedaan ini mempengaruhi kesiapan fasilitas, kapasitas pengawasan, dan stabilitas distribusi makanan. Selain itu, kesiapan teknologi seperti pemanfaatan aplikasi MATA HATI juga berbeda antar sekolah; beberapa sekolah membutuhkan adaptasi lebih lama untuk terbiasa dengan pelaporan digital. Temuan ini sesuai dengan pandangan Wahab bahwa lingkungan sosial dan ketersediaan teknologi merupakan determinan penting dalam implementasi kebijakan publik .

Kedua, **dukungan publik** memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan program. Dukungan orang tua yang tinggi memberikan legitimasi dan memperkuat posisi sekolah dalam menjalankan program. Namun Wahab menekankan bahwa dukungan publik bersifat fluktuatif—ketika kualitas layanan menurun, dukungan dapat melemah. Hal ini terlihat ketika orang tua mengeluhkan menu atau kebersihan makanan; sekolah harus merespons cepat agar kepercayaan publik tidak menurun. Dengan demikian, kualitas makanan dan ketepatan waktu distribusi menjadi faktor penting yang menentukan kestabilan dukungan masyarakat .



Ketiga, **sikap dan sumber daya kelompok pelaksana** berperan penting dalam implementasi MBG. Guru dan kepala sekolah menunjukkan komitmen kuat untuk melaksanakan program meski harus menanggung beban kerja tambahan. Mereka membentuk tim khusus, membagi tugas, dan mengembangkan mekanisme koordinasi dengan UMKM. Namun kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas fisik sekolah tidak merata. Sekolah dengan jumlah guru lebih banyak dapat membagi tugas distribusi dengan baik, sementara sekolah dengan tenaga terbatas mengalami beban lebih besar. Selain itu, variasi kapasitas UMKM menyebabkan ketidakteraturan kualitas makanan, menunjukkan bahwa satuan pelaksana program sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan mitra eksternal .

Keempat, **dukungan lembaga atasan** dalam hal ini Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan sangat kuat. Kota Surabaya menunjukkan komitmen serius dengan membentuk satgas, menetapkan SOP sementara, dan menyediakan mekanisme monitoring yang aktif. Namun tanpa juknis pusat yang rinci, pemerintah daerah harus membuat interpretasi dan pedoman sendiri sehingga pelaksanaan memiliki variasi antar sekolah. Hal ini sesuai teori Wahab, bahwa implementasi kuat membutuhkan perintah yang jelas dan dukungan struktural; tanpa petunjuk rinci dari level pusat, konsistensi implementasi sulit dicapai .

Kelima, **kepemimpinan pejabat pelaksana** seperti kepala sekolah menjadi faktor paling dominan dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kepala sekolah yang proaktif mampu mengelola distribusi makanan dengan baik, mengatur pembagian tugas, membuka komunikasi dengan UMKM, serta membuat mekanisme evaluasi rutin. Beberapa sekolah memiliki inovasi khusus seperti sistem “tepak kosong”, rotasi penanggung jawab (PG), dan mekanisme pengaduan langsung ke dinas. Temuan ini sesuai dengan Wahab yang menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan menentukan efektivitas implementasi karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali proses dan penjamin stabilitas pelaksanaan kebijakan .

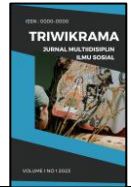
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya dan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Solichin Abdul Wahab (2001), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MBG secara umum berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif langsung bagi peserta didik serta masyarakat. Program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kecukupan gizi anak, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan peran koordinatif yang kuat melalui pembentukan tim monitoring, penggunaan aplikasi MATA HATI sebagai media pengawasan harian, serta komunikasi aktif dengan sekolah dan UMKM. Namun, implementasi program di lapangan menunjukkan adanya variasi efektivitas antar sekolah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah, kesiapan fasilitas sekolah, dan perbedaan kapasitas UMKM penyedia makanan. Sekolah di wilayah padat seperti Semampir menghadapi tantangan lebih besar dalam manajemen distribusi makanan dibanding sekolah dengan fasilitas yang lebih memadai seperti SMA Negeri 8 Surabaya. Kapasitas UMKM yang tidak seragam menyebabkan ketidakkonsistenan kualitas dan ketepatan waktu distribusi, sehingga beberapa sekolah harus melakukan pemeriksaan kualitas tambahan sebelum makanan dibagikan. Dukungan masyarakat, terutama orang tua siswa, sangat tinggi karena

*Corresponding author

E-mail addresses: ndea1809@gmail.com



manfaat langsung yang dirasakan, meskipun dukungan ini tetap dipengaruhi oleh kualitas menu dan mekanisme penyampaian keluhan. Hambatan implementasi lainnya mencakup keterbatasan fasilitas penyimpanan di beberapa sekolah, beban administrasi guru dalam pelaporan harian, serta ketiadaan petunjuk teknis nasional yang rinci sehingga sekolah harus menyusun SOP masing-masing. Di tengah berbagai dinamika tersebut, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor paling dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, karena kepala sekolah berperan dalam mengorganisasi tenaga pelaksana, menjaga komunikasi dengan UMKM, serta memastikan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi MBG di Surabaya telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan upaya penyempurnaan dalam aspek standarisasi teknis, peningkatan kapasitas UMKM, dan penguatan fasilitas pendukung agar program dapat berlangsung secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah pusat** perlu menyusun petunjuk teknis (juknis) yang lebih rinci agar standar pelaksanaan MBG di setiap daerah tidak berbeda-beda.
2. **Dinas Pendidikan Kota Surabaya** perlu meningkatkan monitoring mutu makanan dan ketepatan waktu distribusi melalui evaluasi rutin bersama UMKM.
3. **Sekolah** harus memperkuat tim pelaksana internal dengan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar.
4. **UMKM penyedia makanan** perlu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas sanitasi agar menu yang diberikan lebih konsisten dan layak konsumsi.
5. **Sekolah dan UMKM** perlu memperbaiki komunikasi dua arah, terutama terkait keluhan menu, porsi, atau keterlambatan distribusi.
6. **Pemerintah daerah** diharapkan memberikan dukungan tambahan berupa fasilitas penyimpanan makanan bagi sekolah yang sarana fisiknya masih terbatas.

5. DAFTAR PUSTAKA

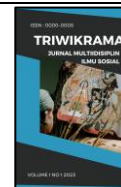
Ade Nasihudin. (n.d.). *Program Makan Bergizi Gratis Jajaki Hari Pertama, Apa Tugas Kemenkes?* Liputan 6. <https://www.liputan6.com/>

Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Segar*. <https://www.bapanas.go.id/>

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). *Jumlah SD Menurut Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2023/2024-2024/2025*. <https://surabayakota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). *Jumlah TK Menurut Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2023/2024-2024/2025*. <https://surabayakota.bps.go.id/>

D.I., R. S. (n.d.). *Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utamanya*. Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>



Detik News. (2025). *Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp 1,1 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis*. <https://news.detik.com/>

Direktori Vokasi Universitas Airlangga. (n.d.). *Peta Wilayah Administratif Kota Surabaya*. <https://direktori.vokasi.unair.co.id/>

Julfitri, R. I., & Prakoso, C. T. (2022). Implementasi kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses fasilitas publik di Kota Samarinda. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 6003-6016. <https://doi.org/10.31289/jap.v10i1>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Program Pemenuhan Gizi Seimbang dan Pencegahan Stunting*. <https://www.kemkes.go.id/>

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Krisnawati, R. (2025). Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. *Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>

Kompas. (2025). *Pemerintah Mulai Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025*. <https://www.kompas.com/>

Kontan. (2024). *Pemerintah Akan Mulai Program Makan Bergizi Gratis*. <https://www.kontan.co.id/>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. (2024). <https://jdih.setneg.go.id/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). *Penjelasan Pembentukan Badan Gizi Nasional*. <https://setkab.go.id/>

Wikipedia. (2024). *Kota Surabaya*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya

World Health Organization. (n.d.). *School Feeding and Nutrition Guidelines*. <https://www.who.int/>